

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul “Kriminalisasi Opsi Biner”. Maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut :

5.1.1

Pengaturan dalam hal untuk memberikan regulasi ulang terhadap opsi biner dengan memikirkan dampak-dampak dari opsi biner ini sehingga opsi biner bisa dijadikan sebagai salah satu instrument investasi bagi para masyarakat Indonesia. Hal ini penulis katakan karena menurut penulis opsi biner ini justru bisa menjadi wadah bagi masyarakat Indonesia untuk berinvestasi atau mencari uang. Karena ada beberapa korban yang melapor kerugian atau merasa ditipu oleh platform opsi biner ini, maka pemerintah Indonesia menetapkan untuk melarang perdagangan opsi biner tanpa memikirkan dampak-dampak positif lain yang dapat kita manfaatkan dengan platform opsi biner ini. Pengaturan mengenai opsi biner ini memang belum ada yang secara khusus menjelaskan, ada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang mengatur tentang perdagangan berjangka. Pengkriminalisasian opsi biner sendiri dirasa tidak memungkinkan untuk dilakukan di Indonesia melihat dari bahwa opsi biner ini secara bebas dan mudah diakses di internet dan dirasa sampai sekarang jika sesuatu hal yang dapat dengan mudah diakses menggunakan internet akan sangat sulit untuk diawasi dan dilarang. Pelarangan terhadap opsi biner yang kurang maksimal ini membuat hasil yang rancu. Sehingga dalam praktiknya sendiri opsi biner sampai saat ini masih dengan sangat mudah diakses. Hal ini menurut penulis dikarenakan tidak adanya UU yang secara khusus mengkriminalisasi platform opsi biner ini dan juga ketidakjelasan kalau memang dilarang maka siapa juga yang harus dihukum dari platform opsi biner ini.

Sampai sekarang belum ada pengkriminalisasian opsi biner hanya ada pelarangan terhadap opsi biner ini. Kriminalisasi dan pelarangan adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya dapat terkait dengan pembatasan aktivitas atau praktik tertentu. Kriminalisasi merujuk pada tindakan menjadikan suatu perilaku atau aktivitas sebagai tindakan kriminal yang melanggar hukum. Ini berarti bahwa pemerintah atau sistem hukum negara tersebut mengeluarkan undang-

undang atau peraturan yang menyatakan bahwa melakukan tindakan tertentu adalah suatu kejahatan yang dapat dihukum. Pelarangan adalah tindakan resmi pemerintah atau badan pengatur untuk melarang atau melarang aktivitas tertentu. Ini berarti bahwa pemerintah atau badan pengatur mengeluarkan peraturan atau kebijakan yang mengatakan bahwa aktivitas tersebut tidak boleh dilakukan atau dilarang.

5.1.2

Pemerintah Indonesia sudah melakukan beberapa tindakan terhadap platform opsi biner di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia mengeluarkan peraturan yang melarang aktivitas perdagangan opsi biner di Indonesia. Langkah ini diambil untuk melindungi konsumen dari risiko yang tinggi dan praktik penipuan yang terkait dengan opsi biner. Pemerintah Indonesia, melalui OJK dan otoritas terkait, telah meningkatkan pengawasan dan penegakan terhadap pelanggaran terkait opsi biner. Mereka bekerja sama dengan kepolisian dan lembaga terkait untuk melacak dan menindak broker atau entitas yang terlibat dalam kegiatan ilegal terkait opsi biner. Pemerintah Indonesia juga telah melakukan upaya edukasi kepada masyarakat tentang risiko dan bahaya yang terkait dengan opsi biner. OJK secara aktif memberikan peringatan kepada masyarakat agar berhati-hati terhadap investasi ilegal yang menawarkan opsi biner.

pelarangan opsi biner di Indonesia adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk melindungi konsumen dari risiko tinggi dan praktik penipuan yang terkait dengan opsi biner. Pelarangan tersebut menunjukkan niat pemerintah untuk menangani permasalahan yang ada. Efektivitas pelarangan dan upaya lainnya terhadap opsi biner dapat bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kepatuhan industri dan masyarakat, kemampuan otoritas pengawas untuk mengidentifikasi dan menindak pelanggaran, dan ketersediaan sumber daya yang diperlukan untuk penegakan hukum. Efektivitas dari pelarangan opsi biner oleh pemerintah Indonesia masih belum efektif melihat dari kegiatan-kegiatan opsi biner seperti iklan-iklan yang masih dipublikasikan secara bebas di internet kurangnya ketegasan mengenai pelarangan opsi biner ini membuat para pelaku tidak jera. Perlu diperhatikan juga untuk kemampuan pemerintah Indonesia jika memang ingin melarang perdagangan opsi biner di Indonesia secara tegas.

5.2 Saran

5.2.1

Dalam hal ini dengan pelarang terhadap opsi biner yang belum efektif dan ketidakmampuan pemerintah untuk mengkriminalisasi opsi biner, maka menurut penulis ada saran-saran yang dapat penulis berikan yaitu adalah untuk melegalkan perdagangan opsi biner di Indonesia melihat dari bahwa opsi biner ini berpotensi untuk menjadi salah satu instrument investasi bagi para masyarakat Indonesia, tetapi jelas bahwa opsi biner ini harus diregulasi atau diawasi secara ketat oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi investor dari risiko tinggi dan praktik penipuan yang terkait dengan opsi biner. Regulasi yang ketat dapat mencakup persyaratan lisensi untuk penyedia opsi biner, persyaratan modal minimum, larangan praktik pemasaran yang menyesatkan, dan perlindungan terhadap praktik penipuan. Regulasi harus mewajibkan penyedia opsi biner untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan kepada investor. Ini termasuk informasi tentang risiko yang terkait dengan opsi biner, metode perhitungan harga opsi, dan hak dan kewajiban investor. Pengungkapan yang jelas akan membantu investor membuat keputusan investasi yang informan. Regulasi harus memberikan perlindungan kepada konsumen melalui aturan yang melarang praktik penipuan, praktik pemasaran yang menyesatkan, dan kegiatan ilegal terkait opsi biner. Hal ini juga dapat mencakup perlindungan terhadap risiko yang terkait dengan opsi biner dan persyaratan keuangan yang memadai untuk penyedia opsi biner. Regulasi yang baik harus mendorong penyedia opsi biner untuk menyediakan pendidikan dan informasi yang memadai kepada investor. Ini dapat membantu investor memahami risiko dan peluang yang terkait dengan opsi biner, sehingga mereka dapat membuat keputusan investasi yang informan. Regulasi harus menyediakan kerangka kerja untuk pengawasan dan penegakan hukum yang efektif terhadap pelanggaran terkait opsi biner. Ini akan membantu mengidentifikasi dan menindak penyedia opsi biner ilegal atau yang melanggar peraturan. Saran-saran tersebut bisa menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk mengatur Kembali keputusan tentang opsi biner.

5.2.2

Opsi biner masih dapat dijadikan sebagai salah satu instrumen investasi bagi masyarakat Indonesia, namun dibutuhkan regulasi ulang untuk mempertimbangkan dampak-dampaknya.

Meskipun ada beberapa korban yang melapor kerugian atau merasa ditipu oleh platform opsi biner, larangan perdagangan opsi biner secara keseluruhan tampaknya tidak efektif dan dapat mengabaikan potensi dampak positifnya. Karena pengkriminalisasian opsi biner dianggap tidak memungkinkan dan pelarangan belum memberikan hasil maksimal, diperlukan pendekatan yang lebih bijaksana dalam mengatur opsi biner.

Dengan mengacu pada perbedaan antara kriminalisasi dan pelarangan, saran yang dapat diambil dari kesimpulan ini adalah sebagai berikut:

1. **Regulasi yang Bijaksana:** Pemerintah Indonesia harus mengadopsi pendekatan yang bijaksana dalam mengatur perdagangan opsi biner. Regulasi yang tepat harus mempertimbangkan baik potensi manfaat dan risiko yang terkait dengan opsi biner. Mengkriminalisasi opsi biner mungkin bukan solusi yang efektif, tetapi regulasi yang tepat dapat membantu melindungi para investor dan masyarakat dari risiko yang tidak diinginkan.
2. **Perlindungan Konsumen:** Fokus harus diberikan pada perlindungan konsumen terhadap praktik penipuan dan risiko tinggi yang terkait dengan perdagangan opsi biner. Badan pengawas keuangan dan regulator harus bekerja sama untuk mengawasi dan memastikan bahwa platform opsi biner yang beroperasi di Indonesia mematuhi standar yang ketat untuk melindungi kepentingan para investor.
3. **Edukasi dan Informasi:** Pendidikan dan informasi mengenai perdagangan opsi biner harus menjadi prioritas. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja opsi biner, risiko yang terlibat, dan bagaimana mengambil keputusan investasi yang bijaksana. Dengan pemahaman yang lebih baik, masyarakat akan lebih mampu membuat keputusan investasi yang cerdas dan berinformasi.
4. **Konsultasi dengan Ahli:** Dalam mengatur opsi biner, pemerintah dapat berkonsultasi dengan ahli keuangan, ekonomi, dan hukum untuk mendapatkan wawasan yang mendalam tentang potensi dampak dan solusi terbaik. Pendekatan kolaboratif ini dapat membantu menciptakan regulasi yang seimbang dan efektif.
5. **Evaluasi Berkala:** Regulasi yang diberlakukan harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dengan memantau perubahan tren pasar dan dampak regulasi, pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang berkembang.

Opsi biner bisa menjadi instrumen investasi yang menguntungkan bagi masyarakat Indonesia jika diatur dengan bijaksana. Dengan regulasi yang tepat, perlindungan konsumen yang baik, edukasi yang memadai, konsultasi dengan ahli, dan evaluasi berkala, opsi biner dapat menjadi pilihan investasi yang aman dan menguntungkan bagi para investor tanah air.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Kamaruddin, Ahmad. (2014). *Dasar-dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*, Prof. Moeltjano, S.H., (2021). *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono. (1981). *Kriminologi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sudarto. (1983). *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

B. Jurnal

- Mantulangi, Nando. (2017). *Kajian Hukum Investasi Dan Perlindungan Terhadap Korban Investasi Bodong*, V(1), 108-115.
- Budiastanti, Dhaniar Eka. (2017). *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 8(1).
- Haidar, M, B., & Rusdiana, E. *Kategori Binary Option Trading Sebagai Perjudian Berbasis Dalam Jaringan (Online)*, 158-167.

C. Laman Internet

- KBBI. (n.d.). *Investasi*. (2016). Diakses 4 april 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/investasi>
- Downey, L. (2021). *Binary Option*. Diakses 4 april 2022, dari <https://www.investopedia.com/terms/b/binary-option.asp>
- Safira, I. (2022). *Heboh Binary Option, Begini Sejarahnya!*. Diakses 4 april 2022, dari <https://finance.detik.com/fintech/d-5920562/heboh-binary-option-begini-sejarahnya>
- Annur, C. (2022). *Rentannya Masyarakat Terjerat Investasi Bodong*. Diakses 4 april 2022, dari <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/6231b8319b44e/rentannya-masyarakat-terjerat-investasi-bodong>
- Kurniawan, R. *Apa Itu Binary Option, Bagaimana Legalitasnya di Indonesia?*. Diakses 4 april 2022, dari

- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/01/28/183131665/apa-itu-binary-option-bagaimana-legalitasnya-di-indonesia?page=all>
- Makkir, S. (2022). *SWI Tegaskan Binomo, Binary Option Sebagai Judi*. Diakses 4 april 2022, dari <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220221173704-78-762050/swi-tegaskan-binomo-binary-option-sebagai-judi>
- Nurhadi, M. (2022). *Alasan Binary Option Dilarang Negara, Dianggap Judi Melanggar Hukum Pidana*. Diakses 4 April 2022, dari <https://www.suara.com/bisnis/2022/03/08/152631/alasan-binary-option-dilarang-negara-dianggap-judi-melanggar-hukum-pidana>
- CNN Indonesia. (n.d.). *Indra Kenz Dijerat Pasal Judi Online hingga Pencucian Uang*. Diakses April 10 2023, dari <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220308164904-12-768381/indra-kenz-dijerat-pasal-judi-online-hingga-pencucian-uang>
- Ellyvon, P. *Jejak Kasus Indra Kenz dan Penipuan Binomo hingga Tuntutan 15 Tahun Penjara*. Diakses 10 April 2023, dari <https://nasional.kompas.com/read/2022/10/07/05150031/jejak-kasus-indra-kenz-dan-penipuan-binomo-hingga-tuntutan-15-tahun-penjara>
- Mahardika, L. (2022). *Bappebti: Binary Option Ilegal di Indonesia*. Diakses 12 April 2023, dari <https://market.bisnis.com/read/20220126/94/1493578/bappebti-binary-option-ilegal-di-indonesia>
- Dirgantara, H. (2022). *Bappebti Blokir 92 Entitas Binary Option di 2021, Termasuk Binomo, IQ Option*. Diakses 12 April 2023, dari <https://investasi.kontan.co.id/news/bappebti-blokir-92-entitas-binary-option-di-2021-termasuk-binomo-iq-option>
- Klik Legal (n.d.). *Bappebti Tidak Bisa Fasilitasi Korban Binary Option, Lho Kenapa?*. Diakses 12 April 2023, dari <https://kliklegal.com/bappebti-tidak-bisa-fasilitasi-korban-binary-option-lho-kenapa/>